Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

DESAIN KEBIJAKAN INOVATIF DALAM MENINGKATKAN MUTU DAN DAYA SAING LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA DIGITAL

Bahruddin[1*], Eka Yuliani[2*], Zamroni[3*]
Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

bahruddinjantur1997@gmail.com, yuliani452@gmail.com
zamroni1802.uinsi@gmail.com,

ABSTRACT

Islamic Educational Institutions (IEIs), including madrasahs, pesantren, and Islamic higher education institutions, are required to improve quality and competitiveness amid digital transformation without losing their Islamic identity. This article aims to formulate an innovative policy design for improving the quality and competitiveness of IEIs in the digital era. The study employs a descriptive qualitative method, using literature review and content analysis of Laudon and Laudon's work on management information systems, five recent studies in Islamic educational institutions, and literature on public policy and educational quality. The findings show that the quality and competitiveness of IEIs depend on the alignment of three dimensions: organization, management, and technology. The policy design comprises six pillars: digital governance and leadership, innovative curriculum and learning, human resource and digital literacy development, integrated information infrastructure and systems, partnership and collaboration, and quality assurance with continuous evaluation. It is guided by the values of amanah, shura, ta'awun, tabayyun, and itqan, and implemented through a cycle of formulation, implementation, evaluation, and reformulation. IEI leaders should treat digital transformation as a policy matter, not merely a technical procurement matter. As a literature review, the framework remains conceptual and requires empirical testing.

Keywords*: Innovative Policy, Quality, Islamic Educational Institutions, Digital Era.*

ABSTRAK

Lembaga Pendidikan Islam (LPI), baik madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan Islam, dituntut meningkatkan mutu dan daya saing di tengah transformasi digital tanpa meninggalkan jati diri keislaman. Artikel ini bertujuan merumuskan desain kebijakan inovatif untuk meningkatkan mutu dan daya saing LPI di era digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan analisis konten terhadap karya Laudon dan Laudon tentang sistem informasi manajemen, lima penelitian terkini di lembaga pendidikan Islam, serta

literatur kebijakan publik dan mutu pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mutu dan daya saing LPI ditentukan oleh keselarasan tiga dimensi, yaitu organisasi, manajemen, dan teknologi. Desain kebijakan dirumuskan dalam enam pilar: tata kelola dan kepemimpinan digital, kurikulum dan pembelajaran inovatif, pengembangan SDM dan literasi digital, infrastruktur dan sistem informasi terintegrasi, kemitraan dan kolaborasi, serta penjaminan mutu dan evaluasi berkelanjutan. Desain ini dipandu nilai amanah, syura, ta'awun, tabayyun, dan itqan, serta dijalankan melalui siklus formulasi, implementasi, evaluasi, dan reformulasi. Pimpinan LPI perlu memandang transformasi digital sebagai persoalan kebijakan, bukan sekadar pengadaan perangkat teknis. Karena merupakan studi pustaka, kerangka ini masih bersifat konseptual dan perlu diuji secara empiris.

Kata Kunci: Kebijakan Inovatif, Mutu, Lembaga Pendidikan Islam, Era Digital.

A. Pendahuluan

Transformasi digital mengubah cara lembaga pendidikan menyelenggarakan layanan, mengelola data, dan membangun hubungan dengan masyarakat. Calon peserta didik dan orang tua kini membandingkan lembaga melalui informasi daring, kualitas layanan administrasi, dan kejelasan capaian belajar. Bagi Lembaga Pendidikan Islam (LPI), tuntutan ini hadir bersamaan dengan harapan masyarakat agar lembaga tetap menjaga akhlak, spiritualitas, dan tradisi keilmuan Islam. Dengan demikian, LPI menghadapi dua tuntutan sekaligus: bersaing secara mutu dan tetap setia pada identitasnya.

Persoalan mutu dan daya saing LPI tidak cukup dijawab dengan membeli perangkat atau membangun aplikasi. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teknologi memberi manfaat nyata, tetapi hasilnya bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan infrastruktur (Noviyanti dkk. 2025; Hadijah dan Ramli 2025). Artinya, keberhasilan digitalisasi sangat ditentukan oleh kebijakan lembaga yang mengatur arah, peran, anggaran, dan evaluasi. Tanpa desain kebijakan yang jelas, inovasi cenderung berjalan sporadis, bergantung pada individu tertentu, dan sulit dipertahankan.

Kajian sebelumnya umumnya membahas sistem informasi manajemen atau kolaborasi digital secara terpisah dan dalam konteks kasus tertentu. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menerjemahkan kerangka sistem informasi menjadi desain kebijakan yang utuh, yang menghubungkan mutu, daya saing, teknologi, dan nilai Islam. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah merumuskan desain kebijakan inovatif untuk meningkatkan mutu dan daya saing LPI di era digital.

1. Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam

Mutu pendidikan dipahami sebagai kemampuan lembaga memenuhi dan melampaui harapan pemangku kepentingan secara

konsisten, dengan penekanan pada perbaikan berkelanjutan (Sallis 2002). Pada LPI, mutu mencakup mutu akademik, mutu layanan, mutu akhlak dan spiritual, serta mutu tata kelola. Daya saing, menurut Porter (1985), lahir dari keunggulan yang sulit ditiru, misalnya melalui diferensiasi. Bagi LPI, diferensiasi yang paling khas adalah perpaduan antara kompetensi akademik dan pembinaan karakter keislaman. Namun diferensiasi ini hanya bernilai apabila didukung layanan yang efisien, data yang akuntabel, dan komunikasi yang transparan.

2. Kebijakan Inovatif dan Tata Kelola Digital

Kebijakan adalah pilihan tindakan atau non-tindakan yang diambil otoritas untuk mengatasi masalah tertentu (Dye 2013). Analisis kebijakan menekankan bahwa kebijakan yang baik berangkat dari perumusan masalah yang tepat, alternatif yang dipertimbangkan, dan evaluasi hasil (Dunn 2018). Kebijakan bersifat inovatif apabila ia tidak hanya menyalin praktik lama, tetapi menata ulang proses, peran, dan sumber daya agar lembaga mampu beradaptasi. Dalam konteks digital, Laudon dan Laudon (2020) memandang sistem informasi sebagai kesatuan tiga dimensi, yaitu organisasi, manajemen, dan teknologi. Pandangan sosioteknis ini menjadi dasar bahwa kebijakan digital harus menyentuh struktur dan budaya organisasi, kapasitas kepemimpinan, serta perangkat teknologi secara bersamaan.

3. Nilai-nilai Islam sebagai Landasan Kebijakan

Kebijakan LPI perlu memiliki landasan nilai yang jelas. Lima nilai berikut digunakan sebagai pemandu desain kebijakan:

1. Amanah, yaitu menyampaikan amanat kepada yang berhak (QS. An-Nisa' [4]: 58), menjadi dasar akuntabilitas pimpinan dan pengelolaan data.
2. Syura (QS. Asy-Syura [42]: 38), menjadi dasar perumusan kebijakan secara partisipatif.
3. Ta'awun (QS. Al-Ma'idah [5]: 2), menjadi dasar kolaborasi internal dan eksternal.
4. Tabayyun (QS. Al-Hujurat [49]: 6), menjadi dasar verifikasi informasi dan validitas data.
5. Itqan, yaitu kesungguhan dan ketelitian dalam bekerja, menjadi dasar mutu layanan dan sistem.

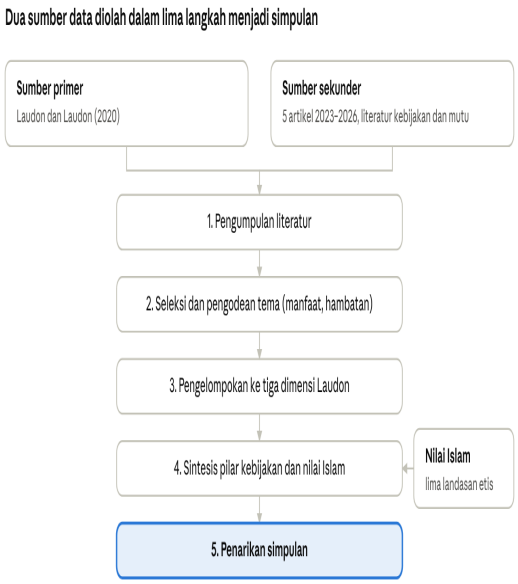
Selain itu, semangat perubahan yang dimulai dari diri dan komunitas (QS. Ar-Ra'd [13]: 11) menguatkan gagasan bahwa transformasi lembaga memerlukan kesiapan manusia, bukan hanya perangkat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis konten. Studi pustaka dipilih karena tujuan penelitian adalah menyintesis konsep dan temuan yang sudah ada menjadi kerangka desain kebijakan, bukan mengukur kondisi lapangan. Sumber data primer adalah buku Laudon dan Laudon (2020) tentang

sistem informasi manajemen. Sumber data sekunder terdiri atas lima artikel jurnal terbitan 2023 sampai 2026 tentang sistem informasi manajemen, kolaborasi digital, dan manajemen perubahan di lembaga pendidikan Islam, serta literatur pendukung tentang kebijakan publik dan mutu pendidikan. Artikel dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaian topik, konteks lembaga pendidikan Islam, dan ketersediaan penelusuran identitas publikasi.

Analisis data dilakukan melalui lima langkah: (1) pengumpulan literatur; (2) penyeleksian dan pengodean temuan berdasarkan tema manfaat, hambatan, dan faktor keberhasilan; (3) pengelompokan tema ke dalam dimensi organisasi, manajemen, dan teknologi; (4) sintesis untuk merumuskan pilar kebijakan dan keterkaitannya dengan nilai Islam; dan (5) penarikan simpulan. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan antarartikel dengan kerangka teoretis Laudon dan Laudon.



alur metode · 2 sumber data, 5 langkah

Gambar 1. Alur Metode Penelitian Studi Pustaka dan Analisis Konten

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakteristik Literatur yang Dikaji

Lima penelitian yang dikaji memberikan gambaran tentang manfaat dan hambatan digitalisasi di lembaga pendidikan Islam. Ringkasannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Literatur yang Dikaji

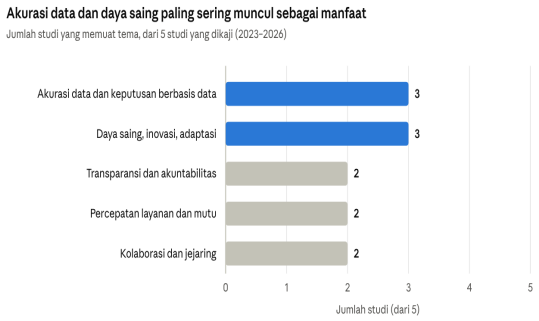
No	Penulis dan Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama
1	Chotimah, Setyowati, dan Jurna	Sistem informasi manajeme	Studi literatur, analisis deskriptif	Sistem informasi membantu

No	Penulis dan Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama
	lis (2023)	n dalam kompetisi bisnis lembaga pendidikan Islam		lembaga bersaing secara sehat dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui informasi yang akurat dan tepat waktu
2	Noviyanti dkk. (2025)	Sistem informasi akademik pada manajemen berbasis sekolah (STIT Al-	Studi kasus kualitatif	Layanan administrasi lebih cepat, data lebih akurat, keputusan berbasis data;
		Ihsan Baleendah)		terkendala infrastruktur dan literasi digital staf
3	Hadijah dan Ramli (2025)	Manajemen perubahan berbasis kolaborasi digital (MAN Kota Samarinda)	Studi kasus kualitatif	Platform cloud dan supervisi digital meningkatkan transparansi dan kapasitas adaptif; hambatan berupa infrastruktur, kesenjangan kompetensi digital

No	Penulis dan Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama
				, dan resistensi perubahan
4	Hakimudin, Sari, dan Ayu (2025)	Model manajemen berbasis inovasi dan kolaborasi (MAN 1 Bandar Lampung)	Studi kasus kualitatif	Inovasi digital dan kolaborasi pentahelix membentuk model manajemen yang sistematis
5	Pitriani, Annur, dan Rosad (2026)	Sistem informasi dalam pengambilan keputusan kepala madrasah	Kualitatif	Sistem informasi terintegrasi dan real-time meningkatkan kualitas keputusan,

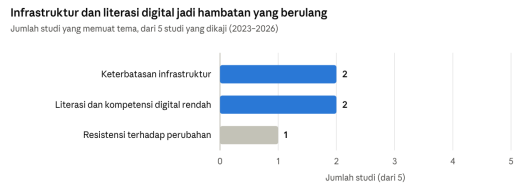
No	Penulis dan Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama
				efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi

Hasil pengodean tema dari kelima penelitian tersebut menunjukkan pola yang konsisten. Manfaat yang paling sering muncul adalah peningkatan akurasi data dan keputusan berbasis data, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Hambatan yang paling sering muncul adalah keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi atau kompetensi digital. Pola ini ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3.



pengodean penulis atas Tabel 1 · satu studi dapat memuat lebih dari satu tema

Gambar 2. Frekuensi Tema Manfaat Digitalisasi pada Lima Penelitian yang Dikaji



pengodean penulis atas Tabel 1 · satu studi dapat memuat lebih dari satu tema

Gambar 3. Frekuensi Tema Hambatan Digitalisasi pada Lima Penelitian yang Dikaji

Perlu dicatat bahwa angka pada kedua gambar tersebut adalah jumlah penelitian yang memuat tema terkait berdasarkan ringkasan temuan pada Tabel 1. Angka itu menunjukkan kecenderungan dalam sampel yang terbatas dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi statistik.

2. Persoalan Mutu dan Daya Saing LPI di Era Digital

Berdasarkan sintesis literatur, persoalan mutu dan daya saing LPI dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi Laudon (2020).

Dimensi organisasi. Struktur yayasan, kepala madrasah atau pengasuh, serta budaya religius merupakan kekuatan lembaga, tetapi dapat menjadi sumber resistensi apabila perubahan tidak dikomunikasikan dan tidak dirumuskan bersama. Hadijah dan Ramli (2025) mencatat resistensi perubahan sebagai salah satu hambatan kolaborasi digital di madrasah.

Dimensi manajemen. Keputusan pimpinan sering diambil dengan data yang tersebar dan terlambat. Pitriani dkk. (2026) menunjukkan bahwa informasi terintegrasi dan real-time meningkatkan kualitas keputusan dan akuntabilitas pengelolaan madrasah.

Dimensi teknologi. Keterbatasan infrastruktur dan sistem yang tidak terintegrasi menyebabkan data ganda dan beban administrasi bagi guru (Noviyanti dkk. 2025; Hadijah dan Ramli 2025).

Ketiga dimensi tersebut saling mengunci. Teknologi yang canggih tidak akan meningkatkan mutu jika organisasi tidak siap dan pimpinan tidak memiliki kebijakan yang mengarahkannya. Oleh karena itu, kebijakan inovatif harus dirancang sebagai paket yang menyentuh ketiganya.

3. Enam Pilar Desain Kebijakan Inovatif

Berdasarkan sintesis tersebut, desain kebijakan inovatif untuk meningkatkan mutu dan daya saing LPI dirumuskan dalam enam pilar.

Pilar 1: Kebijakan tata kelola dan kepemimpinan digital. Pilar ini menetapkan visi digital lembaga, struktur pengampu transformasi digital, dan mekanisme pengambilan keputusan. Kebijakan yang dirumuskan secara musyawarah (syura) melibatkan yayasan, pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sehingga mengurangi resistensi perubahan. Prinsip amanah diwujudkan melalui pembagian peran yang jelas dan pelaporan berkala kepada pemangku kepentingan.

Pilar 2: Kebijakan kurikulum dan pembelajaran inovatif. Pilar ini mengatur integrasi pembelajaran digital dengan kekhasan keilmuan Islam, misalnya penyusunan perangkat ajar kolektif, repositori materi, dan pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran. Hadijah dan Ramli (2025) menunjukkan bahwa penyusunan perangkat ajar kolektif melalui platform cloud meningkatkan transparansi dan kapasitas adaptif madrasah. Prinsip itqan menuntut agar inovasi diukur dari ketepatannya mencapai tujuan belajar, bukan dari banyaknya aplikasi yang dipakai.

Pilar 3: Kebijakan pengembangan SDM dan literasi digital. Kesenjangan kompetensi digital merupakan hambatan yang berulang pada penelitian yang dikaji. Kebijakan pada pilar ini mencakup pelatihan berjenjang, pendampingan sejawat, insentif bagi pendidik inovatif, serta pembatasan beban administrasi digital agar guru tidak mengisi data ganda. Semangat ta'awun diwujudkan melalui komunitas belajar yang saling membantu antarpendidik.

Pilar 4: Kebijakan infrastruktur dan sistem informasi terintegrasi. Pilar ini mengatur jaringan, perangkat, penyimpanan data, serta integrasi sistem akademik, keuangan, kesiswaan atau kesantrian, dan layanan alumni dalam satu sumber data. Prinsip aplikasi perusahaan menurut Laudon dan Laudon (2020) menawarkan solusi agar data berasal dari satu sumber yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini juga memuat perlindungan data pribadi peserta didik dan pencatatan keuangan, termasuk dana infak dan wakaf, yang dapat diaudit sebagai wujud amanah. Pembiayaan dapat dirancang melalui kombinasi anggaran lembaga, dukungan pemerintah, dan skema kemitraan.

Pilar 5: Kebijakan kemitraan dan kolaborasi. Hakimudin dkk. (2025) menemukan bahwa kolaborasi pentahelix yang melibatkan madrasah, perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta membentuk model manajemen yang sistematis. Kebijakan pada pilar ini mengatur kerja sama dengan pihak luar, kolaborasi lintas unit, dan keterlibatan alumni serta masyarakat sebagai bagian dari ta'awun yang memperkuat kebajikan dan mutu.

Pilar 6: Kebijakan penjaminan mutu dan evaluasi berkelanjutan. Pilar ini menetapkan indikator mutu, audit data, survei kepuasan pengguna, dan mekanisme tindak lanjut. Verifikasi data dan informasi sebelum dipakai untuk keputusan merupakan penerapan tabayyun. Siklus perbaikan berkelanjutan sejalan dengan gagasan mutu dalam pendidikan (Sallis 2002).



kerangka konseptual · 3 dimensi, 6 pilar, 5 nilai

Gambar 4. Kerangka Desain Kebijakan Inovatif: Tiga Dimensi, Enam Pilar, dan Lima Nilai Islam

4. Matriks Kebijakan: Masalah, Instrumen, dan Nilai Islam

Tabel 2 merangkum hubungan antara persoalan yang ditemukan, instrumen kebijakan, dan nilai Islam yang melandasinya.

Tabel 2. Matriks Desain Kebijakan Inovatif LPI

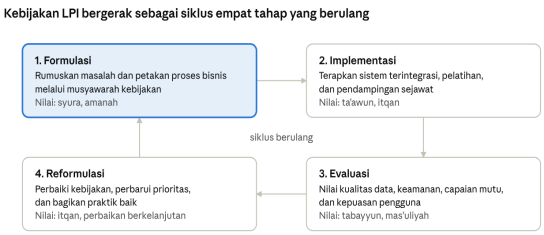
Pilar Kebijakan	Persoalan yang Dijawab	Instrumen Kebijakan	Nilai Islam
1. Tata kelola dan kepemimpinan digital	Resistensi perubahan; arah transformasi belum jelas	Peta jalan digital; tim pengampu transformasi; forum musyawarah kebijakan	Syura, amanah
2. Kurikulum dan pembelajaran inovatif	Pembelajaran digital belum terintegrasi dengan kekhasan	Pedoman pembelajaran digital; repositori perangkat ajar; pembelajaran campuran	Itqan
3. SDM dan literasi digital	Kesenjangan kompetensi digital; beban administrasi ganda	Pelatihan berjenjang; pendampingan sejawat; insentif inovasi	Ta'awun, itqan
4. Infrastruktur dan sistem terintegrasi	Infrastruktur terbatas; data tersebar dan ganda	Satu sumber data; standar keamanan dan privasi; audit keuangan	Amanah, tabayyun
5. Kemitraan dan kolaborasi	Keterbatasan sumber daya internal; jejaring sempit	Nota kerja sama; forum pentahelix; program alumni	Ta'awun
6. Penjaminan mutu	Keputusan tanpa data	Indikator mutu;	Tabayyun,

Pilar Kebijakan	Persoalan yang Dijawab	Instrumen Kebijakan	Nilai Islam
dan evaluasi	valid; perbaikan tidak berkelanjutan	audit data; survei kepuasan; laporan publik	amanah, itqan

5. Siklus Kebijakan: Formulasi, Implementasi, Evaluasi, dan Reformulasi

Desain kebijakan di atas dijalankan melalui siklus empat tahap yang mengacu pada tahapan analisis kebijakan (Dunn 2018) dan siklus perbaikan berkelanjutan.

1. Formulasi. Lembaga merumuskan masalah, memetakan proses bisnis dan kebutuhan informasi (dimensi organisasi), menyusun alternatif kebijakan, dan memutuskannya melalui musyawarah. Nilai dominan adalah syura dan amanah.
2. Implementasi. Lembaga menerapkan sistem terintegrasi dan perangkat kolaborasi (dimensi teknologi), disertai pelatihan dan pendampingan (dimensi manajemen). Nilai dominan adalah ta'awun dan itqan.
3. Evaluasi. Lembaga menilai kualitas data, keamanan, capaian mutu, dan kepuasan pengguna. Data diverifikasi sebelum dipakai untuk keputusan. Nilai dominan adalah tabayyun dan mas'uliyah.
4. Reformulasi. Hasil evaluasi dipakai untuk memperbaiki kebijakan, memperbarui prioritas, dan membagikan praktik baik sebagai pengetahuan lembaga. Nilai dominan adalah itqan dan perbaikan berkelanjutan.



siklus kebijakan · 4 tahap, searah jarum jam

Gambar 5. Siklus Kebijakan Inovatif LPI: Formulasi, Implementasi, Evaluasi, dan Reformulasi

6. Strategi Peningkatan Daya Saing

Kebijakan inovatif berkontribusi pada daya saing melalui tiga jalur. Pertama, efisiensi layanan. Sistem informasi akademik mempercepat layanan administrasi dan meningkatkan akurasi data (Noviyanti dkk. 2025), sehingga pengalaman pengguna membaik. Kedua, kepercayaan publik. Transparansi dan akuntabilitas yang meningkat melalui sistem terintegrasi (Pitriani dkk. 2026) dan supervisi digital (Hadijah dan Ramli 2025) memperkuat kepercayaan orang tua dan mitra. Ketiga, diferensiasi. Menurut Porter (1985), keunggulan bertahan lama ketika sulit ditiru. Perpaduan mutu akademik, pembinaan karakter, dan tata kelola

yang amanah merupakan diferensiasi khas LPI yang tidak mudah disamai lembaga lain. Dengan demikian, daya saing LPI bertumpu pada keunggulan nilai yang didukung kemampuan teknologi, bukan pada teknologi semata.

7. Indikator Keberhasilan Kebijakan

Agar kebijakan dapat dievaluasi, setiap pilar perlu memiliki indikator yang terukur. Tabel 3 mengusulkan indikator yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing lembaga.

Tabel 3. Usulan Indikator Keberhasilan Kebijakan

Pilar	Indikator	Cara Pengukuran
Tata kelola dan kepemimpinan	Tersedianya peta jalan digital dan laporan kinerja berkala	Dokumen kebijakan; notulen forum musyawarah
Kurikulum dan pembelajaran	Proporsi perangkat ajar yang tersimpan dan ditinjau di repositori	Audit repositori; observasi pembelajaran
SDM dan literasi digital	Keikutsertaan pelatihan dan kemampuan pendidik memakai sistem	Daftar hadir; asesmen kompetensi digital
Infrastruktur dan sistem	Tingkat integrasi data dan insiden data ganda atau bocor	Audit sistem; log insiden
Kemitraan	Jumlah dan keberlanjutan kerja sama aktif	Dokumen kerja sama; laporan kegiatan
Penjaminan mutu	Kepuasan pengguna dan tindak lanjut hasil evaluasi	Survei kepuasan; catatan tindak lanjut

8. Implikasi dan Keterbatasan

Secara praktis, pimpinan LPI perlu memulai dari pemetaan masalah dan musyawarah, bukan dari pembelian perangkat. Pengembangan SDM dan perbaikan infrastruktur perlu dipandang sebagai bagian dari kebijakan inti karena keduanya merupakan hambatan yang paling sering muncul. Secara teoretis, artikel ini memperluas pemakaian kerangka Laudon dan Laudon dari ranah sistem informasi ke ranah desain kebijakan pendidikan Islam. Keterbatasan penelitian ini adalah sifatnya yang

konseptual dan jumlah literatur yang terbatas, sehingga pilar dan indikator yang diusulkan perlu diuji pada konteks madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan yang berbeda.

D. Kesimpulan

Mutu dan daya saing LPI di era digital ditentukan oleh keselarasan organisasi, manajemen, dan teknologi, sehingga upaya peningkatannya memerlukan desain kebijakan yang menyeluruh. Artikel ini merumuskan enam pilar kebijakan inovatif, yaitu tata kelola dan kepemimpinan digital, kurikulum dan pembelajaran inovatif, pengembangan SDM dan literasi digital, infrastruktur dan sistem informasi terintegrasi, kemitraan dan kolaborasi, serta penjaminan mutu dan evaluasi berkelanjutan. Nilai amanah, syura, ta'awun, tabayyun, dan itqan menjadi landasan etis yang menjaga agar kebijakan tetap selaras dengan identitas keislaman.

Daftar Pustaka:

Agus Tardian. "Manajemen Strategik Mutu Sekolah: Studi Kasus di SD Al Irsyad Al AIslamiyyah 02 Purwokerto." *Jurnal Kependidikan* 2 (2019): 192–203. https://doi.org/10.24090/jk.v7i2.2989.

Ahmad Janan Asifudin. "Manajemen Pendidikan untuk Pondok Pesantren." *Jurnal Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1 (2016): 355–66. https://doi.org/10.14421/manageria.2016.12-10.

Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Al Hadharah* 17 (2018): 81–95. https://doi.org/10.18592 / alhadharah.v17i33.2374.

Ahmad Royani. "Eksistensi Pendidikan Pesantren Dalam Arus Perubahan." *Jurnal Cendekia* 16 (2018): 375–92. https://doi.org/10.21154/cendekia.v16i2.1242.

Ajibah Quroti Aini. "Islam Moderat di Pesantren: Sistem Pendidikan, Tantangan, dan Prospeknya." *Edukasia Islamika : Jurnal Pendidikan Islam* 3 (2018): 218–33. https://doi.org/10.28918/jei.v3i2.1689.

Akhmad Muadin. "Manajemen Pemasaran Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidz Qur‟an." *Jurnal Ta‟allum* 05 (2017): 293–308. https://doi.org/10.21274/taalum.2017.5.2.293-308.

Al Mumayyaz, Al Qur‟an Tajwid Warna, Transliterasi Per kata, Terjemah Perkata. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.

Andina Prasetya, Muhammad Fadhil Nurdin, dan Wahju Gunawan. "Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal." *Jurnal Sosietas* 11 (2021): 929–39. https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i2.41617.

Chotimah, Setyowati, dan Jurnalis. 2023. “Sistem Informasi Manajemen dalam Kompetisi Bisnis Lembaga Pendidikan Islam.”